

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDT) mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi JK, Khususnya NAWACITA ketiga yaitu Membangun Indonesia dan memperkuat daerah di desa. Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, tangguh, mandiri, dan demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini merupakan instrumen kebijakan resmi untuk membangun pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan desa sebagai sebuah komunitas dalam masyarakat Indonesia harus diberdayakan untuk mencapai kemandirian dan kebahagiaan masyarakat (Hahury, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa dapat mendirikan Badan Usaha Desa (BUMDes) berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021). Dengan demikian untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa maka desa sudah seharusnya membentuk dan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 pengertian dari BUMDes itu sendiri adalah memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan kegiatan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa. Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tujuan didirikannya badan usaha desa antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa,

menciptakan peluang pasar, dan membangun jaringan untuk menunjang kebutuhan pelayanan publik Masyarakat (Basri et al.,2021). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi penguatan ekonomi desa berdasarkan kepentingan dan kekuatan desa, BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Yudiard, 2015).

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Pemukiman Kembali (PDPT) sebesar 15.768 badan usaha desa (BUMDes) terkena dampak epidemi ini. Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pada tahun 2021, jumlah penduduk BUMDes akan mencapai 57.273 orang. Rinciannya, 45.233 BUMDes aktif dan 12.040 BUMDes tidak aktif. Sebanyak 45.233 BUMDes masih beroperasi, mempekerjakan 20.369.834 orang dan menghasilkan pendapatan Rp4,6 triliun selama setahun terakhir. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatra Barat. Fenomena di Kabupaten Dharmasraya tersebut memiliki luas wilayahnya mencapai 2.961,13 dan terdiri dari 11 kecamatan dari 52 Desa dan terdapat 52 BUMDes tercatat pada tahun 2022 Terdapat 21% dari 52 Desa yang terdistribusi BUMDes di Kabupaten Dharmasraya, sehingga masih ada 79% desa yang BUMDes nya tersebut belum berjalan sempurna. Tercatat pada Tahun 2022 yakni tercatat 23 BUMDes yang aktif dan menurut Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa akan mengaktifkan 27 Bumdes yang sebelumnya bertransaksi dan akan bisa berjalan kembali. Tentu semua itu tidak mudah, Tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan. Hal tersebut dapat terwujud, ketika masyarakat dan pemerintah desa dapat bersatu dan bergotong royong serta mulai sadar akan pentingnya BUMDes (Metro Padang.com). Namun berbagai data menunjukkan mayoritas sebagian besar BUMDes hanya berdiri, dan tidak memiliki inovasi (Basriet al., 2021).

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Desa yang Secara geografis Desa ini berada di dataran rendah dari data dinas pemberdayaan desa 2022 terdapat 61 Desa dan 61 BUMDes berdasarkan situs data desa BUMDes yang aktif 26 dan yang tidak aktif 35 BUMDes. Dapat dilihat dari Sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat penting untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat Sijunjung memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kondisi alam yang sangat mendukung. Badan usaha milik Desa memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi ini dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat, yang akan membantu mereka menjadi lebih mampu memanfaatkan hasil sumber daya alam. Masyarakat Sijunjung sekarang memiliki lapangan kerja karena adanya Badan Usaha Milik Desa yang memanfaatkan potensi Desa Diharapkan bisnis ini semakin berkembang dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Sijunjung.

Badan Usaha Milik Desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Sijunjung tersebut telah berinovasi dari menggunakan teknologi tradisional menjadi teknologi yang canggih seperti sekarang ini, sehingga meningkatkan nilai jual dari setiap produk yang dijual. BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan inovasi yang memperkuat kegiatan ekonomi dan membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan BUMDes dapat dicapai.

Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja BUMDes atau Salah satu dari banyak variabel yang dapat memengaruhi kinerja BUMDes adalah inovasi sosial. Inovasi sosial didefinisikan sebagai aktivitas, proses, dan pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengembangkan dan membuat produk inovatif yang membedakannya dari organisasi lain di pasar (Wardhana, 2021). Selain itu, kinerja BUMDes dapat berkembang dan maju karena ada inovasi sosial, yang tercermin dalam

sikap kreatif dan berani mengambil risiko (Ranto 2016). Kinerja BUMDes di Dharmasraya ini sangat berpengaruh terhadap inovasi sosial begitu pula inovasi sosial sangat penting berpengaruh terhadap kinerja terutama dalam persaingan (Jiwa & Madiarsa, 2019).

Beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang menghambat kinerja Bumdes yaitu inovasi sosial yang sulit, kurangnya inisiatif untuk menginovasi produk, penguasaan teknologi, kurangnya kemampuan menggali untuk menginspirasi masyarakat dan dukungan pemerintah serta masyarakat yang masih rendah (Pasricha & Rao 2018). Penelitian (Madjodjo & Dahlan, 2020) pada BUMDes di Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa BUMDes tidak memiliki transparansi dalam proses akuntabilitas, baik pada pengelolaan maupun tanggungjawab terhadap anggaran.

Menurut Sofiani (2020) kendala-kendala yang dapat menunjang kemajuan kegiatan BUMDes adalah adanya keterampilan, pelatihan, kejujuran, rasa tanggung jawab, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan serta bisa kerjasama tim yang baik. Transparan antar pengelola BUMDes adalah sikap tanggungjawab dalam berjuang mencapai tujuan kepercayaan dalam keselamatan kerja. Sampai saat ini, beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penerapan terhadap kinerja seperti penelitian Suryadi (2010) yang menegaskan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi, dibuktikan dengan adanya keterbukaan organisasi. dengan memberikan informasi. dan menangani keluhan masyarakat secara langsung. Pengelola BUMDes dituntut untuk mengatasi kendala-kendala diatas dan untuk memajukan BUMDes di tuntut untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan BUMDes, bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan perintah allah dalam surat QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105).

ayat diatas membahas tentang motivasi amal dan makna bekerja keras. Ayat ini sangat kental dengan makna bekerja keras yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga pengelola BUMDes termotivasi dengan ayat ini. Hal ini terkandung dalam beberapa ayat di Al-Qur'an salah satunya adalah surah At-Taubah ayat 105. Selain itu agar dapat survive BUMDes juga perlu melakukan transparansi agar dapat di percaya oleh masyarakat dan berkembang dengan baik itu kenapa transparansi begitu penting dalam BUMDes akan tetapi akuntabilitas juga berperan penting dalam BUMDes akan tetapi di dalam kabupaten dharmasraya dan sijnjung tersebut sikap transparansi terhadap Masyarakat sekitar yang masih kurang karena dengan adanya sikap transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan, kejujuran dan rasa saling bekerja keras untuk meningkatkan BUMDes tersebut untuk lebih maju.

Transparansi adalah prinsip saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan jaminan Untuk mudah mengumpulkan informasi. Transparansi adalah salah satunya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan sangat diperlukan. Tata kelola desa di Indonesia mengalami perubahan drastis pasca terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Akibat undang-undang baru ini, pemerintah desa kini mempunyai otonomi untuk mengatur dan

mengurus urusan daerah dan kepentingan Masyarakat. Penerapan praktik tata kelola yang baik di tingkat desa merupakan sebuah tantangan, kesulitan dalam hal ini mencerminkan fakta bahwa sumber daya di pemerintahan desa khususnya sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi, masih belum berkembang secara memadai dan memiliki banyak keterbatasan (Sofyani et al., 2018b). Tata Kelola BUMDes harus transparan dalam pengelolaan dengan menyampaikan informasi secara terbuka apabila pengelolaan BUMDes transparan maka inovasi sosial yang dilakukan untuk BUMDes akan semakin diapresiasi dan semakin menguatkan kinerja BUMDes.

Prinsip transparansi akan berjalan baik apabila pengelola paham mengenal visi misi, tujuan serta hubungan yang baik antar individu pengelola BUMDes maka pengelola memiliki komitmen sehingga dapat mempertanggungjawabkan. Inovasi sosial meningkatkan kinerja BUMDes apabila mendorong transparansi. Beberapa penelitian lain menunjukkan peningkatan transparansi terhadap kinerja (Sofiyani et al., 2020).

Penelitian ini menggabungkan dua penelitian terdahulu (Pasricha & Rao 2018; Sofiyani et al., 2020). Pasricha dan Rao (2018) menguji inovasi sosial dalam hubungan antar Masyarakat dan transparansi pemerintah daerah dengan Respondennya adalah laki-laki 138 orang dan 51 orang Perempuan. Sofiyani et al., (2020) menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi meningkatkan kepercayaan Masyarakat dengan sampel 400 kuesioner ke 200 desa (200 kepada pejabat pemerintah desa dan 200 kepada anggota dewan permusyawaratan desa). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh inovasi sosial terhadap kinerja, sementara penelitian ini akan menambahkan variabel transparansi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian tersebut tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di bahas yaitu berjudul “**Analisis Pengaruh**

Inovasi Terhadap Kinerja BUMDes Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Di Dharmasraya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah inovasi sosial berpengaruh terhadap kinerja ?
2. Apakah Transparansi memoderasi pengaruh inovasi sosial terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh inovasi terhadap kinerja BUMDes.
2. pengaruh moderasi transparansi terhadap hubungan inovasi sosial dan kinerja BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut yaitu menjelaskan bahwa hasil Penelitian ini dapat menambah bukti empiris yang mengkonfirmasi teori Stewardship dan RBV terkait inovasi sosial dan transparansi dalam memajukan BUMDes.

b. Manfaat Praktis

Sebenarnya pencarian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah Dapat meningkatkan BUMDes dan Memikirkan tentang cara mengelola BUMDes dengan transparansi atau keterbukaan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja BUMDes.
- 2) untuk BUMDes Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan masalah yang timbul dengan saran-saran untuk memecahkannya, serta dapat memberikan manfaat kepada kinerja BUMDes.